

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

RKPD merupakan suatu dokumen resmi rencana daerah yang mempunyai peranan penting dalam menghubungkan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD sebagai penentu kebijakan umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kemudian KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

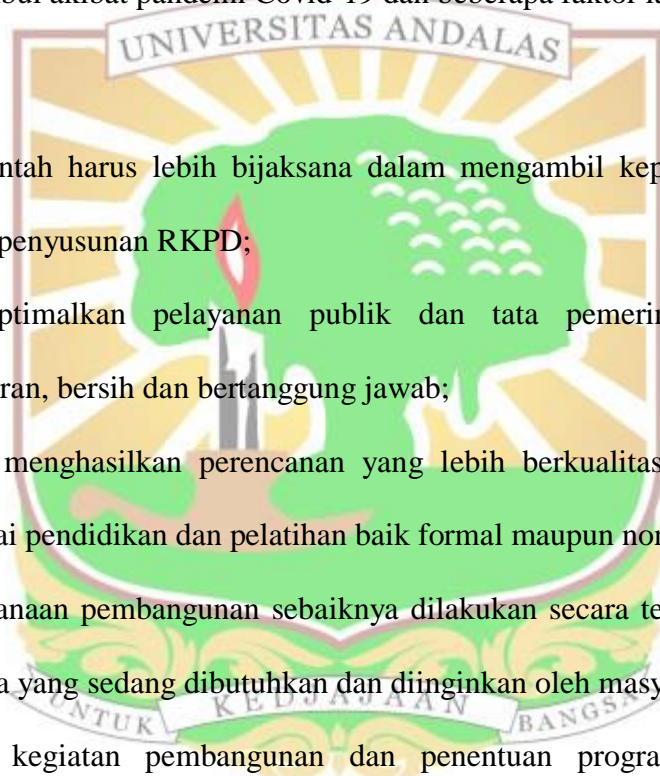
1. Dalam proses penyusunan RKPD Kota Padang melibatkan segala unsur didalamnya dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara, perencanaan, pelaksana dan pengawasan sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah berjalan seperti yang diharapkan dan bisa memenuhi kebutuhan Kota Padang;
2. RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus

terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran;

3. Untuk pelaksanaannya sendiri pada tahun 2021 sedang dilaksanakan. Apabila ada kendala atau rencana yang telah direncanakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan dilaksanakan kembali pada RKPD perubahan.
4. Tidak terlaksananya rencana tersebut disebabkan karena beberapa masalah yang timbul akibat pandemi Covid-19 dan beberapa faktor lainnya.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan pada saat proses penyusunan RKPD;
2. Mengoptimalkan pelayanan publik dan tata pemerintah yang baik, transparan, bersih dan bertanggung jawab;
3. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas perlu dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal;
4. Perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara teliti dan harus tau apa saja yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat;
5. Untuk kegiatan pembangunan dan penentuan program pembangunan sebaiknya masyarakat juga turut ikut serta, agar aspirasi rakyat dan apa yang mereka inginkan dapat tercapai dan terlaksana tanpa ada nya gangguan atau hambatan;
6. Untuk beberapa aturan yang di ubah dalam proses penyusunan RKPD akibat Pandemi Covid-19, hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi agar



peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya keraguan bagi pihak yang menjalankan;

